

ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH PENGHASIL PRODUK BERBAHAN BAKU SAGU DI DESA BANGLAS KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

Arief Rifa'i Harahap dan Hendry Andry

Dosen Program Studi Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Email : Email : ariefrh16@yahoo.co.id

Abstract

This study analyzes the theme of empowerment of small and medium enterprises producing products made from sago in the Village District of Tebing Tinggi vast Meranti Islands regency in Riau province. Sago contain carbohydrates and may be an alternative to the staple food rice paddy fields began to decrease, or as food additives other than rice. This means that the potential of sago as an alternative to rice big enough. During this time the production of sago sago farmers and SMEs in the District Meranti intended to meet local market and surrounding areas as well as sold to various regions in Indonesia, including the export opportunities are not limited to the countries neighboring Malaysia but also to other countries. Research on sago as a staple food alternatives is urgent. With the reason that most people do not properly understand the uses and benefits of corn as the raw material processed foods. As a result, the cultivation of sago is not optimized because the market demand is still small. This study aims to identify the potential of SMEs producing products made from sago didesa vast Tebing Tinggi District of Meranti Islands regency, efforts to diversify the food products made from sago results micro-entrepreneurs or SMEs to be more diverse. Includes also examined the potential development of the market to make it more comprehensive, and the efforts - efforts to empower sago entrepreneurs through business and production management system better by the Department of Industry, Trade, Meranti Islands District Koperasidan SMEs through capital assistance, support equipment and training.

Keywords: Small and Medium Enterprises, Product Made From Sago, Empowerment.

Abstrak

Penelitian ini mengambil tema analisis pemberdayaan usaha kecil menengah penghasil produk berbahan baku sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Sagu mengandung karbohidrat dan dapat menjadi alternative pengganti makanan pokok beras yang mulai berkurang lahan persawahan ataupun sebagai makanan tambahan selain beras. Artinya bahwa potensi sago sebagai alternative pengganti beras cukup besar. Selama ini komoditas sagu produksi petani dan pengusaha UKM sagu di Kabupaten Meranti ditujukan untuk memenuhi pasar local dan daerah sekitarnya maupun dijual ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk peluang ekspor yang tidak terbatas ke Negara tetangga Malaysia tetapi juga ke Negara lainnya. Penelitian mengenai sago sebagai bahan makanan pokok alternatif merupakan hal yang urgen. Dengan alasan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara tepat mengenai kegunaan dan manfaat sago sebagai bahan baku makanan olahan. Akibatnya budidaya sagu belum dioptimalkan karena permintaan pasarnya yang masih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali potensi UKM penghasil produk berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, upaya-upaya diversifikasi produk makanan dari bahan sagu hasil pengusaha Mikro atau UKM agar lebih beragam. Mencakup pula meneliti potensi pengembangan pasarnya agar lebih luas, serta upaya – upaya pemberdayaan pengusaha sagu melalui sistem bisnis dan manajemen produksi yang lebih baik oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti melalui kegiatan bantuan modal, bantuan peralatan produksi dan pelatihan.

Kata kunci : Usaha Kecil Menengah, Produk Berbahan Baku Sagu, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Meranti Provinsi Riau, merupakan salah satu penghasil sagu dengan kualitas baik di Indonesia. Salah satu daerah perkebunan dan pengolahan sagu berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Desa Banglas merupakan desa paling luas wilayahnya 35.56 km² (43,90%) diantara 9 desa/kelurahan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. (Kecamatan Tebing Tinggi dalam angka 2014 : 5). Komoditas sagu tersebut bahkan dipasarkan baik lokal maupun ekspor, yaitu antara lain ke Malaysia.

Tanaman sagu termasuk jenis tanaman liar yang tumbuh di air payau atau rawa yang terdapat di selat-selat di sekitar Kabupaten Meranti. Sedangkan tempat pengolahannya atau pabrik disebut *Kilang* berada di pesisir pantai. Sagu termasuk salah satu bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan berpotensi untuk menggantikan makanan pokok beras yang tingkat konsumsinya terus meningkat sementara lahan persawahannya semakin berkurang. Selama ini sagu banyak digunakan untuk bahan baku berbagai produk makanan, antara lain mie, cendol, kerupuk, empek-empek dan sebagainya.

Luas area tanaman perkebunan pada tahun 2013 lahan sagu ± 38.163 Ha dan produksi sagu 198.162 ton (Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2014 : 117) . Hal ini menunjukkan bahwa komoditas sagu merupakan komoditas utama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Budidaya dan pengolahan sagu merupakan sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kabupaten Meranti. Pada umumnya pengolahan sagu masih dilakukan secara tradisional terutama di kalangan petani dan pengusaha lokal.

Pohon sagu yang siap dipanen adalah yang berusia antara 7-10 tahun dengan batang diameter ± 40-50 cm dan tinggi ± 3,00 – 3, 50 meter. Prosesnya dengan cara diambil bagian kambiumnya. Selama ini hasil bahan baku komoditas sagu dihasilkan oleh petani sagu dan pemilik pabrik sagu. Mekanisme pengolahan pati sagu dimulai dengan pemanenan batang sagu yang berumur 10 tahun atau setara dengan 7 ruas batang sagu. Batang-batang tersebut

ditebang untuk dipotong menjadi ruas-ruas sepanjang ± 42 cm yang kemudian dikirimkan ke *Kilang* dengan menggunakan alat transportasi air yang disebut *Pompong* (sampan) dengan cara diikat seperti balok. Tujuannya untuk diproses menjadi pati sagu di tempat pengolahan *Kilang*. Tempat pengolahan sagu tersebut banyak terdapat di daerah pesisir karena memang di desain dekat dengan bahan baku sagu dan memudahkan proses pengangkutan bahan baku yang menggunakan transportasi air. Disamping itu dikarenakan proses pengolahannya banyak membutuhkan air.

Sebagian besar *Kilang* sagu di kecamatan Tebing Tinggi dikelola oleh penduduk keturunan Tionghoa hanya 1 *Kilang* yang dimiliki oleh warga Melayu. Rata-rata *Kilang* sagu memiliki pekerja sebanyak 10 s/d 15 orang dan tergantung oleh kapasitas produksinya. Satu *Kilang* sagu rata-rata mampu mengolah bahan baku sagu sebanyak 500 ruas/hari. Satu ruasnya menghasilkan rata-rata 30 kg pati sagu kering. Jadi dalam satu hari sebuah *Kilang* sagu mampu menghasilkan ± 15.000 kg.

Sagu diolah oleh penduduk pribumi secara tradisional tapi jumlahnya sangat terbatas dan tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ini di lingkungan petani sagu terdapat praktek *ijon* yang menyebabkan beberapa petani sagu hidup di dalam kekuasaan pengusaha sagu. Bahkan tidak sedikit petani lokal yang menjual kebun sagunya untuk membayar hutangnya.

Selama ini para petani sagu menjual tanamannya yang berupa batangan kepada pemilik *Kilang* antara Rp. 500.000,- s.d Rp. 700.000,-/batang. Namun dengan sistem *ijon* harganya menjadi turun drastis yaitu berkisar antara Rp. 100.000,- s.d 200.000,-/ batang. Satu batang sagu yang siap panen rata-rata terdiri dari 6 -7 buah ruas. Setelah melalui pengolahan sebuah ruas dapat menghasilkan ± 30 kg tepung sagu. Rata-rata sebuah *Kilang* mampu memproduksi sekitar 500 ruas/ hari. Hal ini menunjukkan bahwa sagu merupakan sebuah potensi di daerah tersebut.

Proses pengolahannya dengan cara memotong-motong batangnya dalam bentuk ruas yang panjangnya ± 40-50 cm. Kemudian ruas-

ruas tersebut dibelah dan dikelupas kulitnya untuk diambil kambiumnya. Selanjutnya cambium tersebut dicuci dan dikeringkan dengan mesin pengering yang terdapat di *Kilang*. Proses pencuciannya dilakukan selama 2 kali dan limbahnya dibuang ke laut. Proses pembuatan sagu memerlukan banyak air sehingga lokasi pabrik pengolahan tersebut berada di daerah pesisir.

Hal ini menunjukkan bahwa sagu merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan agar produktivitasnya lebih meningkat. Upaya-upaya di atas sekaligus dapat meningkatkan nilai keekonomiannya dan pendapatan bagi para petani, pengusaha Mikro maupun pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) produk makanan olahan dari bahan sagu.

Usaha produk makanan menggunakan bahan baku sagu tersebut banyak dilakukan oleh penduduk setempat. Selama ini sagu digunakan untuk berbagai bahan baku makanan setelah diolah terlebih dahulu menjadi tepung. Selanjutnya tepung tersebut diolah sebagai bahan baku berbagai makanan, antara lain *Sinonggim, Kapurung, Bageak*, mie, kerupuk, cendol dan lainnya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti potensi bisnis petani dan pengusaha sagu agar lebih berkembang. Termasuk pengembangan bisnis yang berbasis kewirausahaan sebagai sebuah aspek penting dalam pengembangan bisnis sekarang. Mengenai pengertian kewirausahaan yang juga berkaitan dengan inovasi adalah sebagai berikut: “...*the entrepreneur is one who is willing to fear the risk of a new venture if there is a significant chance for profit. Other emphasizes the entrepreneur's role as an innovator who markets his innovation. Entrepreneurs develop new goods or processes that the market demands and are not currently being supplied*” (*Principles of Entrepreneurship*:2).

Urgensi (keutamaan) penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Selama ini komoditas sagu produksi petani dan pengusaha UKM sagu di Kabupaten Meranti ditujukan untuk memenuhi pasar lokal dan daerah sekitarnya maupun dijual ke berbagai daerah di Indonesia, antara lain didistribusikan melalui pelabuhan Cirebon.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dalam rangka pengembangan pasar lokal yang masih terbuka luas.

2. Sagu mengandung karbohidrat dan dapat menjadi alternatif pengganti makanan pokok beras yang mulai berkurang lahan persawahan ataupun sebagai makanan tambahan selain beras. Artinya bahwa potensi sagu sebagai alternatif pengganti beras cukup besar.

Penelitian mengenai sagu sebagai bahan makanan pokok alternatif merupakan hal yang urgen. Dengan alasan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara tepat mengenai kegunaan dan manfaat sagu sebagai bahan baku makanan olahan. Akibatnya budi daya sagu belum dioptimalkan karena permintaan pasarnya yang masih kecil.

3. Selama ini jenis dan varian makanan dari bahan baku sagu masih terbatas, antara lain makanan sebagai berikut: *Sinonggi, Kapurung, Bageak*, mie, cendol, empek-empek, kerupuk dan lainnya.

Dalam rangka mengembangkan penggunaan bahan baku sagu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai potensi pemakaian bahan baku sagu untuk bahan baku makanan lainnya. Sehingga jenis makanan dari bahan baku sagu lebih variatif dan menarik. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi produknya agar lebih menarik dan memiliki nilai tambah dan jual tinggi. Pengertian inovasi adalah sebagai berikut: “*To be effecting, an innovation has to be simple, and it has to be focused. It should do only the thing; otherwise it confuses people. Effective innovations start small they are not grandiose*” (Drucker, 2002 : 9).

4. Perlunya dilakukan penelitian mengenai pemberdayaan pengusaha Mikro dan pengusaha UKM sagu dari aspek ekonomi dan bisnis agar potensinya lebih meningkat, terutama dari aspek keekonomiannya atau pendapatannya.

Temuan atau inovasi yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen produksi sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi petani sagu lokal dan pemilik *Kilang* warga

Melayu. Selama ini proses produksi petani lokal masih bersifat tradisional, yaitu dengan menggunakan alat-alat sederhana. Hal ini disebabkan oleh tujuan produksinya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lokal atau setempat. Keterbatasan alat produksi atau teknologi tersebut berdampak terhadap produktivitas dan kualitas produknya.

2. Diversifikasi produk makanan olahan dari bahan sagu agar lebih banyak jenis atau variannya. Dengan bertambahnya jenis dan varian produk makanan dan bahan sagu, maka segemen pasarnya pun dapat berkembang. Disamping itu, pola konsumsi sagu di masyarakat akan semakin meningkat sekaligus penghasilan para petani sagu lokal maupun pengusaha Mikro produk makanan bahan sagu meningkat pula.

Selama ini pemasaran produk makanan tersebut masih sangat terbatas dan sebagian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setempat. Sehingga cara pengolahannya maupun penampilan produk-produknya kurang menarik. Melalui program diversifikasi produk tersebut diharapkan dapat memperluas segmen pasarnya, tidak hanya terbatas pasar lokal tetapi juga melebar ke propinsi lain.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti ?
2. Bagaimana proses pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti ?

Tujuan Penelitian

Melihat pada latar belakang dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM dalam Pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti ?

2. Mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti ?

Target Luaran

Penelitian ini memiliki target luaran yang nantinya dapat bermanfaat bagi pemerintah pada dua aspek, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya studi tentang konsep peran negara khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti .
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk lebih dapat berupaya mencari strategi dan cara-cara yang tepat untuk memberdayakan pelaku usaha kecil menengah berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti dalam memperbaiki kehidupan mereka.
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan iptek melalui penelitian lanjutan, seminar, dan prosiding serta pengayaan bahan ajar.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kewirausahaan dan Inovasi

Tanaman sagu termasuk jenis tumbuhan liar yang tumbuh subur di payau-payau di sekitar Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Budidaya tumbuhan ini banyak dibudidayakan oleh penduduk setempat sebagai salah satu mata pencaharian pokoknya. Sagu tersebut diolah menjadi tepung dan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku makanan yang dipasarkan dalam bentuk tepung. Penjualan tepung tersebut

hingga luar kabupaten, termasuk memasok ke pulau Jawa melalui pelabuhan Cirebon. Sagu selain mengandung karbohidrat juga memiliki keistimewaan tersendiri, misalnya sebagai bahan pengawet alami untuk empek-empek dengan cara ditaburkan di atas makanan tersebut.

Komoditas sagu adalah sebuah potensi ekonomi yang perlu dikembangkan dan diberdayakan oleh para petani dan produsen makanan dari bahan baku tersebut, termasuk untuk meningkatkan penghasilan mereka. Selama ini komoditas tersebut dibudidayakan dan diolah secara sederhana oleh sebagian petani dan produsen makanan bahan baku sagu. Dalam kondisi ekonomi dan pasar yang kompetitif, maka pelaku usaha dituntut untuk melakukan inovasi agar dapat bertahan maupun bersaing dengan kompetitor lainnya. Persoalannya adalah pemahaman mengenai inovasi tersebut masih belum dipahami secara seksama dan tepat oleh pelaku usaha terutama pengusaha mikro dan UKM.

Definisi inovasi adalah *“Innovations is the specific functions of entire premiership, whether in an exciting business, a public service institution, on a new venture started by a lone individual in the family kitchen”* (Drucker, 2002: 5). Artinya bahwa inovasi dapat dilakukan pada berbagai usaha lembaga layanan publik dan sebagainya termasuk pula pada bidang usaha kerajinan yang identik dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Menurut Drucker bahwa terdapat 7 wilayah kesempatan bisnis yang inovatif yang berasal dari berbagai sumber, meliputi 4 sumber yang berasal dari dalam sebuah perusahaan atau industri. Sementara lainnya di luar area di atas, yaitu dari lingkungan intelektual dan sosialnya perusahaan, perubahan demografi, perubahan persepsi, dan pengetahuan baru. Salah satu sumber tersebut adalah pengetahuan baru yang selama ini belum diperoleh oleh sebagian besar petani dan produsen makanan bahan sagu sehingga perkembangannya bersifat statis.

Penelitian lebih lanjut mengemukakan bahwa: “30 % dari peningkatan penjualan dan laba karena keberhasilan inovasi baik dalam proses maupun dalam produk.” (Sagir, 2011: 596). Kebutuhan inovasi mencakup keduanya, yaitu proses dan produk, sementara kedua aspek tersebut belum dilakukan oleh pelaku usaha sagu

di Kabupaten Kepulauan Meranti karena berbagai faktor, terutama teknologi dan permodalannya. Inovasi bisa dilakukan ke dalam empat jenis yaitu penemuan yaitu kreasi suatu produk, jasa, proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya, pengembangan yaitu pengembangan produk, jasa, proses yang sudah ada, duplikasi yaitu peniruan produk, jasa, proses yang sudah ada, dan sintesis yaitu perpaduan konsep yang sudah ada menjadi formulasi baru (Mas’ud & Mahmud 2004 : 24).

Terdapat keterkaitan erat antara inovasi dengan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Tetapi saat ini terdapat kekeliruan terhadap pemahaman mengenai kewirausahaan, bahwa esensi kewirausahaan adalah: *“Today much confusion exist about the proper definition of entrepreneurship, some observers use the term to refer to all small business; others, to all new businesses. In practice, however, a great many well-established businesses engage in highly successful entrepreneurship. The term then refers no to an enterprises size or age but a certain kind of activity”* (Drucker, 2002: 6)

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti potensi komoditas sagu dan pemberdayaan petani dan produsen makanan bahan sagu di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya dalam aspek inovasi dan kewirausahaannya. Dengan dasar pemikiran bahwa kedua aspek di atas merupakan aspek penting dalam pengembangan bisnis saat ini dan melihat peran sentral Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memberdayakan potensi pelaku usaha dalam meningkatkan dan pengembangan ekonomi (bisnis) dan taraf kehidupannya.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan kesenjangan adalah sebuah kondisi dimana di dalamnya terjadi ketidakmerataan akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang dimiliki (Sudibyo dalam Dewanta, 1999). Dalam menggambarkan cara hidup orang yang berada dalam budaya kemiskinan, Lewis dalam Dewanta (1995), memformulasikan serangkaian

sifat-sifat (*traits*) ekonomi, budaya, sosial dan psikologi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ciri pokok dari orang-orang yang hidup dalam budaya kemiskinan adalah kurangnya partisipasi yang efektif dan integratif dalam institusi-institusi penting yang ada dalam masyarakat, karena sebagian besar yang buta huruf dan berpendidikan rendah serta kekurangan uang. Kehidupan mereka yang serba kekurangan, kondisi tempat tinggal yang sangat menyedihkan, kesumpekan tempat tinggal, kekurangan makanan dan pakaian telah mempengaruhi aspek psikologis mereka.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang mengalami berbagai ancaman untuk bisa hidup layak. Hal ini termasuk tidak cukupnya konsumsi, kerentanan, pendidikan yang rendah, tidak memadainya layanan kesehatan dasar, infrastruktur yang tidak bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari (air bersih, sanitasi, perumahan yang memadai) dan kurangnya peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik sebagai sesama (Mukherjee, 2002).

Letak substansi kemiskinan adalah pada adanya kesenjangan yaitu ketidakmerataan akses yang dapat diperoleh semua segmentasi sosial masyarakat dengan porsi yang relatif sama. Akses hanya dapat dijangkau oleh lapisan tertentu saja, sedangkan yang lain susah untuk memperolehnya.

Kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya, akan tetapi secara relatif mereka berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya (Sulistiyani, 2004).

Pada konteks kemiskinan absolut tentu yang dimaksud kesenjangan adalah terletak pada kesenjangan akses dibidang ekonomis, seperti terhadap fungsi produksi telah menjadikan seseorang tidak berdaya secara ekonomis. Seseorang tidak mendapat melakukan aktivitas produksi secara baik, sehingga pendapatan yang

diperoleh berada dibawah garis kemiskinan. Demikian pula jika masyarakat sulit menjangkau fasilitas dan *aksesabilitas* produksi, maka pendapatan yang diperoleh menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut secara substantif telah menjadikan mereka miskin absolut. (Sulistiyani, 2004).

Lebih lanjut Sulistiyani menambahkan, pola kesenjangan kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kesenjangan kultural dan struktural. Kesenjangan kultural akan lebih kental dipedesaan, dengan divisualisasikan melalui segmentasi dan agregasi masyarakat. Struktur sosial masyarakat desa dibangun atas dasar peta kultural, kesenjangan antar etnis, budaya, agama, nilai yang berkembang dijadikan sebagai tolak ukur perilaku sosial. Kemiskinan kultural dapat dicontohkan melalui deskripsi budaya ataupun adagium-adagium yang tumbuh dan diyakini oleh masyarakat, secara kultural masyarakat terkondisi untuk menjadi miskin. Sedangkan kesenjangan struktural akan nampak jelas antara wilayah atau daerah, antara kota-desa. Kondisi perbedaan tersebut tercipta lantaran suatu daerah memiliki fungsi produksi yang berbeda dengan daerah lain, suatu daerah berhasil melakukan modernisasi-industrialisasi, sedangkan daerah lain masih dikungkung oleh suasana yang tradisional, konvensional, formasi kapital yang rendah dan lain-lain.

Sutyastie dan Prijono (2002) mengidentifikasi kemiskinan dengan dua pertimbangan, pertama karakteristik ekonomi penduduk yang dilihat dari; sumber-sumber pendapatan, pola konsumsi dan pengeluaran dan tingkat ketergantungan. Kedua karakteristik demografi sosial yang dilihat dari tingkat; pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga.

Konsep kemiskinan bersifat multidimensional, oleh karena itu cara pandang yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan kemiskinan hendaknya juga meliputi beberapa aspek dari kemiskinan. Dilihat dari sisi *poverty profile* masyarakat, menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004), kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata; tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*),

tertutupnya akses kepada pelbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selanjutnya menurut Friedman (1992) bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Sedangkan basis kekuasaan sosial tidak terbatas hanya pada modal yang produktif atau ketersediaan aset, seperti; tanah, alat kesehatan, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, untuk memperoleh pekerjaan atau barang-barang, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta informasi yang berguna bagi kemajuan dan perbaikan taraf hidup mereka.

Karena masalah kemiskinan dipahami sebagai persoalan multidimensional yang disebabkan oleh berbagai variabel, maka konsekuensi dari hal ini adalah bahwa penanganan masalah kemiskinan harus ditempuh melalui kebijakan yang berdimensi kompleks dan khas, serta sesuai permasalahan dalam konteksnya masing-masing. Untuk itu perlu dikembangkan model-model program dan proyek yang secara khusus terarah kepada upaya pengentasan masyarakat tertentu dari kemiskinan.

Masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari faktor penyebabnya. Sebagaimana diketahui masalah kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural hampir sama pengertiannya dengan kemiskinan turun temurun. Kemiskinan ini disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi oleh suatu komunitas, sehingga sulit untuk melakukan perubahan. Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi oleh suatu komunitas, yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural adalah merupakan suatu kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor-

faktor tertentu yang dibangun oleh manusia. Faktor-faktor tersebut muncul karena dibangun dan dikondisikan oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada suatu sisi (Sulistiyani, 2004)

Chambers (1997) menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai jebakan kekurangan atau *deprivation trap*. Lebih lanjut Chambers mengatakan bahwa *deprivation trap* itu terdiri dalam lima ketidakberuntungan yang melilit keluarga miskin. Kelima ketidakberuntungan tersebut adalah: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan dan (5) ketidakberdayaan.

Sebagai upaya mengoptimalkan potensi masyarakat dan modal sosial yang dimilikinya maka harus dilakukan pengorganisasian masyarakat (*society organizing*). Pengorganisasian masyarakat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat yang didorong oleh kesadarannya tentang berbagai persoalan di masyarakatnya, kemudian berupaya melakukan perubahan bersama-sama masyarakatnya dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pengorganisasian ini juga akan membantu masyarakat menciptakan aktivitas-aktivitas tertentu dalam mengatasi persoalan yang ada di lingkungannya untuk mencapai konstruksi masyarakat madani yang diharapkan (Tan dan Topatimasang, 2003).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (2005) mengemukakan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sejalan dengan konsep diatas, konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya (atau kehilangan daya)- kekuatan. Dapat dikatakan bahwa yang tidak berdaya adalah mereka yang tidak atau kehilangan kekuatannya. Disini kita memiliki dua kemungkinan utama: pertama, apa yang dilukiskan sebagai tidak punya (tidak memiliki) kekuatan. Dan kedua, apa yang disebut sebagai kehilangan kekuatan. Dua bentuk ini tentu sangat berbeda. Pada yang pertama menunjuk pada situasi yang tidak punya, sedangkan kedua, menunjuk pada proses penghilangan- kondisi awal ada (punya) dan kemudian ada sebuah proses yang membuat tidak ada (Pambudi, 2003).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya atau potensi dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996).

Proses pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on-going process*). Untuk melihat apa yang dimaksud dengan pemberdayaan sebagai *on-going process*, mungkin dapat dilihat apa yang dikemukakan oleh Hogan dalam Adi (2002) yang melihat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*empowerment is not an end-state, but a process that all human beings experience*)).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja, namun juga secara politis dan sosial budaya, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar yang kompetitif, baik secara lokal maupun nasional.

Paradigma pemberdayaan ini ingin mengangkat kondisi yang serba sentralistik (*top down*) dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri, kelompok orang miskin ini juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak luar (Sutrisno, 1995).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memperoleh pandangan baru tentang pemberdayaan usaha kecil menengah penghasil produk berbahan sagu. Khususnya pada peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Meranti dalam proses pemberdayaan pada pelaku usaha UKM penghasil produk berbahan sagu. Karena peneliti ingin lebih dalam mengetahui mengenai peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Meranti melalui wawancara mendalam dengan aparatur yang berwenang dalam pemberdayaan pelaku usaha UKM penghasil produk berbahan sagu dan juga mengamati secara langsung kehidupan pelaku usaha serta mengadakan wawancara dengan palaku usaha produk berbahan sagu.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting peranannya dalam penelitian yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Dengan arah fokus penelitian, peneliti akan tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan. Dalam penelitian ini penetapan fokus penelitian pada peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pemberdayaan UKM penghasil produk berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi . Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Peran pada peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pemberdayaan UKM penghasil produk berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi meliputi :

- A. Bantuan Pemasaran
- B. Bantuan Peralatan
- C. Pelatihan

Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan :

1. Desa Banglas terletak dekat Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan,
2. Desa Banglas merupakan daerah yang terluas diantara desa dan kelurahan di Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga merupakan fenomena yang sangat menarik bagi peneliti.
3. Lokasi penelitian tersebut mudah dijangkau, sesuai dengan kemampuan tenaga yang dimiliki, dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Sumber Data

Yang termasuk sebagai sumber data adalah dapat berupa seseorang, peristiwa, dokumen (hal atau benda) yang dapat dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data atau informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini sumber data diklasifikasikan sebagai berikut

1). Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya yang berupa kata-kata dari informan yang diwawancarai dan peristiwa atau kegiatan yang diamati. Informan sebagai sumber data utama sengaja dipilih dari subjek yang menguasai permasalahan, mengetahui lebih banyak, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah aparat birokrasi/non birokrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Meranti yang menangani langsung/terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha

UKM penghasil produk berbahan sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi.

2). Data Sekunder

Yaitu data yang diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Meranti Dinas , Dokumen kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Meranti, profil Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti, dan lain-lain. Penelitian ini juga menggunakan data yang berasal dari tempat atau area dimana peneliti memperoleh data dengan melakukan pengamatan atau observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan lokasi dan fokus penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Guna memudahkan dalam pengumpulan data, maka penelitian menggunakan instrumen disamping peneliti sendiri juga menggunakan alat Bantu berupa catatan di lapangan, garis besar pedoman wawancara, tape recorder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan *interactive model of analysis* (analisis model interaktif) yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann. Pada model interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), *data display*, dan *coclusion drawing* yaitu terdiri dari tahap penarikan dan verifikasi (Miles dan Hubermann, 1992). Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dengan menggunakan waktu yang ada bagi penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti .

Pengelolaan pemberdayaan pelaku usaha barbahan sugu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti selaku lembaga sebagai penyedia dana dan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan dalam pembangunan masyarakat . Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pelaksana teknis dari kegiatan pengelolaan UKM selalu mengacu pada kebijakan pembangunan yang telah digariskan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebijakan pengelolaan sumber daya UKM pada dasarnya tidak terlepas dari pola dasar pembangunan daerah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs Alfian , MM Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 12 Februari 2016 berikut ini.

“Program-program pengelolaan sumber daya pelaku usaha UKM sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan bahwa pemberdayaan masyarakat pelaku UKM merupakan salah satu kelompok masyarakat yang diprioritaskan, karena di Kabupaten Kepulauan Meranti masyarakat terutama pelaku UKM merupakan masyarakat yang memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi dan mampu menumbuhkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Strategi pengelolaan sumber daya UKM tertuang dalam dokumen rencana strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pelaksana teknis dari kegiatan itu”

Program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya pelaku usaha melalui pemberdayaan adalah hasil dari penjabaran rencana strategis pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai instansi teknis telah membuat rencana strategis yang mempunyai Visi yaitu “ Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri, koperasi yang mapan, guna menunjang

ekonomi kerakyatan menuju masyarakat sejahtera “ .

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM yang bersinergi dengan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2011 – 2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur (Good Governance)
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana industri, perdagangan, dan metrology seperti pelabuhan barang, pos-pos penjagaan di daerah perbatasan, laboratorium UTTP, Tera/ Tera ulang, dan sarana mobilitas baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.
3. Menerapkan teknologi tepat guna dan memanfaatkan potensi wilayah untuk mewujudkan kemandirian industri kecil dan menengah serta menumbuhkan wirausaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengawasi dan mengendalikan kelancaran arus barang dan jasa serta mewujudkan pelaku usaha yang tertib dan jujur dalam rangka perlindungan konsumen.
5. Meningkatkan akses pasar dan informasi usaha
6. Meningkatkan kerjasama bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM antar Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pusat serta lembaga dan organisasi yang terkait
7. Mewujudkan kegiatan industri, dagang yang ramah lingkungan serta penerapan standarisasi produk.
8. Mendukung dan memfasilitasi terbentuknya produk unggulan khas Kabupaten Kepulauan Meranti
9. Memberikan Kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi para pelaku usaha.

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka dalam tatanan program dan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti senantiasa

mengarahkannya pada peningkatan kemampuan seluruh sumber daya para pelaku usaha.

Proses Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbahan Sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti

1. Bantuan Modal

Cara pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pelaku usaha UKM barbahan baku sagu, yakni usaha peningkatan perekonomian mereka melalui usaha pembinaan dan pengembangan serta subsidi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini memberikan bantuan berupa permodalan dengan sistem modal bergulir untuk modal usaha perseorangan, dengan modal bergulir ini diharapkan pelaku usaha yang telah meminjam dapat bertanggung jawab untuk mengembalikannya, karena akan digulirkan kembali kepada pelaku lain yang belum mendapatkan bantuan.

Dana ini yang dialokasikan untuk membantu pelaku usaha UKM agar dapat mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Drs Alfian , MM Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 12 Februari 2016:

“Pemerintah telah memberikan bantuan kepada pelaku usaha UKM berbahan sagu yang berada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha secara perorangan dengan tujuan agar dana tersebut dapat digunakan untuk memudahkan aktifitas kerja. Penyaluran uang bantuan tersebut dengan persyaratan harus memiliki kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu miskin yang dikeluarkan oleh desa dan kartu usaha. ada juga bantuan mesin produksi berupa alat untuk mengaduk adonan dan mesin untuk mencetak mie sagu kepada pelaku usaha yang berada di Desa Banglas berjumlah 2 unit yaitu kepada bapak Anwar Ridwan pengusaha mie sagu berupa mesin pengaduk adonan mie sagu dan ibu Rahmah mesin pengaduk adonan mie sagu dan mesin pencetak mie sagu.

Melihat apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Drs Alfian , MM Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa dalam upaya memberdayakan pelaku usaha yang berada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi, Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan bantuan berupa modal bergulir untuk mempermudah usaha , sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan , hal ini akan memberikan perubahan bagi kehidupan dan perekonomian , karena melalui kegiatan ini telah melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya . Hal ini dibenarkan oleh seorang pelaku usaha penerima bantuan modal ibu Rahmah dalam wawancara pada tanggal 12 februari 2016 berikut ini:

“Benar pak kami telah mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya sendiri mendapat modal pinjaman sebesar Rp 5.000.000 tergantung kepada kemampuan pelaku usaha . dan memang rata-rata kami mendapat jumlah pinjaman yang sama. Dari modal ini saya gunakan untuk membeli bahan baku dan mengganti , menambah peralatan produksi.

Melalui pengamatan peneliti bahwa penggunaan dana pinjaman telah dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pelaku usaha. Kondisi ini bisa terlaksana karena sudah lama mendambakan bantuan modal dari pihak luar, sehingga ketika ada peluang tersebut para pelaku usaha memanfaatkan sebaik-baiknya dana pinjaman tersebut. Hal ini diakui oleh Kepala desa Banglas dalam wawancara pada tanggal 13 februari 2016 dengan peneliti seperti berikut ini:

“Saya sebagai kepala desa sangat senang dengan masyarakat Desa Banglas yang bisa mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, Saya perhatikan bagi pelaku usaha yang sudah mendapat bantuan benar-benar dipergunakan untuk keperluan usaha yaitu pembelian peralatan produksi dan membeli bahan baku. Ini berindikasi bahwa masyarakat mempunyai niat yang baik dalam bantuan modal ini sehingga kepercayaan pemerintah kepada pelaku usaha semakin meningkat begitu pula sebaliknya.”

Dibalik kesungguhan para pelaku usaha dalam memanfaatkan modal pinjaman untuk peningkatan usaha , ternyata ada kendala yang

dihadapi oleh pelaku usaha lain yang belum mendapat bantuan modal. Kendala ini karena dengan sumber daya manusia terbatas pada pelaku usaha sehingga mereka mendapat kesulitan ketika diperhadapkan dengan persyaratan administrasi yang menurut mereka sebagai suatu yang sulit mereka lakukan. Kondisi ini dibenarkan oleh seorang pelaku usaha ibu Diana seperti dalam kutipan wawancara pada tanggal 13 februari berikut ini:

“Memang kami senang karena ternyata pemerintah ada perhatian kepada kami pelaku usaha dengan bantuan modalnya, tetapi ternyata persyaratan untuk pencairan sangat sulit karena kami harus mengajukan permohonan dengan segala administrasinya, kami ini pak kebanyakan hanya sekolah sampai SD bagaimana kami mengerti tentang surat perjanjian pinjaman dan permohonannya apalagi disuruh buat surat itu. Lebih baik kami mencari pinjaman ditempat lain yang tidak memerlukan administrasi yang banyak.” Jadi kendala dalam proses peminjaman dana adalah dari pihak pelaku usaha itu sendiri dengan keterbatasan pendidikan .

Peneliti menemukan fakta dilapangan, bahwa modal yang digunakan oleh pelaku usaha selama ini bermacam-macam sumbernya. Hal ini didukung oleh keterangan yang diberikan oleh Ibu Diana pada tanggal 13 februari 2007 salah seorang pelaku usaha mie sagu sebagai berikut:

“Kehidupan pelaku usaha saat ini sangat sulit, untuk biaya produksi saja biasanya kami meminjam dari rentenir dimana persyaratan administrasi mudah dan cepat tetapi suku bunganya tinggi.

Sumber modal lainnya adalah pemilik toko yang menjual perlengkapan untuk keperluan bahan baku, hal ini merupakan hasil wawancara peneliti pada tanggal 13 Februari 2016 dengan salah seorang pelaku usaha mie sagu yaitu bapak Anuar Ridwan yang kutipannya sebagai berikut:

“biasanya jika kami memerlukan perlengkapan dan bahan baku sagu untuk diolah menjadi produk , kami pergi berutang kepada toko yang menyediakan perlengkapan dan bahan baku yang kami perlukan. Jadi sumber modal pelaku usaha selain kepada tengkulak/rentenir , juga kepada pemilik toko yang menjual perlengkapan dan bahan baku

dengan pengembaliannya setelah mendapatkan penjualan dari produk yang dihasilkan.

2. Bantuan Peralatan Produksi

Selain bantuan modal berbentuk uang, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti juga memberikan bantuan berupa mesin pengaduk adonan dan mesin pemotong mie sagu yang diberikan kepada pelaku usaha di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Drs Alfian , MM Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang peneliti wawancara pada tanggal 12 Februari 2016 yang hasilnya sebagai berikut:

“Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. telah memberikan bantuan berupa mesin pengaduk adonan dan mesin pemotong mie sagu yang diberikan kepada pelaku usaha di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi. Bantuan tersebut bertujuan agar para pelaku usaha khususnya perajin mie sagu agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mampu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Namun bantuan mesin ini dalam pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan, dari tiga pelaku usaha hanya 2 yang mendapatkan bantuan. Hal ini terungkap setelah peneliti mewawancarai ibu Diana seorang pelaku usaha di Desa Banglas 13 Februari 2016, yang kutipannya sebagai berikut:

“ Ada memang bantuan mesin yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti namun bantuan tersebut pilih kasih, yang mendapatkan bantuan mereka yang ada keluarganya bekerja di instansi pemerintah daerah”.

3. Pelatihan

Pelatihan yang dilaksanakan pada masyarakat pelaku usaha bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia agar dapat meningkatkan potensi yang ada dalam diri mereka. Pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pelatihan tentang standar produksi dan pelatihan kemasan dan labeling.

Pelatihan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti oleh pelaku usaha harus menunjukkan pendekatan yang berbasis kemampuan (*competency*) yang dapat mencapai maksud, yaitu pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap peserta. Berikut beberapa jenis pelatihan bagi pelaku usaha di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi.

Pada tahun 2015 oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengadakan pelatihan tentang produksi bagi pelaku usaha mie sagu . Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk dapat menjaga kualitas pruduk melalui perhatian terhadap masalah kebersihan (*hygenitas* produksi) sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan membantu pelaku usaha untuk memperbaiki tekstur dari produk yang dihasilkan melalui pemakaian mesin produksi . Hal ini dikatakan oleh bapak Drs Alfian , MM Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada peneliti yang mewawancarai beliau pada tanggal 12 februari 2016 yang hasilnya sebagai berikut:

“Selain diberikan modal dan mesin, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan metode produksi yang sesuai dengan standar sehingga diharapkan hasil produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan

memiliki standar kebersihannya, kami harapkan dari pelatihan tersebut, pelaku usaha mie sagu dapat menghasilkan produk yang berkualitas”.

Hal ini dibenarkan oleh seorang pelaku usaha yaitu bapak Anuwar Ridwan dalam wawancara pada tanggal 13 Februari 2016 berikut ini:

“ Benar pak bahwa kami disini telah diadakan pelatihan yang berkaitan dengan aspek produksi pembuatan produk mie sagu dan pesertanya adalah pelaku usaha. Dalam pelatihan ini kami bisa mengerti standar produksi yang baik. Memang selama ini kami sudah tahu tetapi proses produksi masih dilakukan secara tradisional dan tidak memenuhi standar produksi yang baik seperti permasalahan kebersihan dan *hygenitas* produksi dan metode untuk membuat produk memiliki tekstur yang sama dengan menggunakan mesin produksi karena selama ini kami masih menggunakan mesin pemotong sagu yang masih tradisional sehingga hasil produk yang dihasilkan tidak memiliki tekstur yang sama. Dengan adanya pelatihan tentang metode produksi kepada pelaku usaha mie sagu menambah ketrampilan kami.”

Untuk lebih jelas akan pelaksanaan pelatihan didesa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya para pelaku usaha mie sagu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jenis-jenis pelatihan bagi Pelaku usaha UKM

No	Tahun	Jenis Pelatihan	Peserta	Pelaksana	Out Put	Out Comes
1	2	3	4	5	6	7
1	2015	Pelatihan metode produksi	Pelaku usaha mie sagu berjumlah 20 orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti	Terlaksananya pelatihan bagi pelaku usaha mie sagu	Pelaku usaha mie sagu mengetahui standar proses produksi yang baik, dan memperhatikan aspek higienis dalam proses produksi.
2	2016	Pelatihan kemasan dan labeling produk	Pelaku usaha mie sagu berjumlah 10 orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti	Terlaksananya pelatihan labeling produk bagi pelaku usaha mie sagu	pelaku usaha mie sagu memahami arti pentingnya kemasan dan labeling suatu produk dan teknik membuat sablon sederhana

(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti 2016).

Pelatihan kedua yang dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pelatihan tentang labeling produk. Pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2016 dengan melibatkan para pelaku usaha. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan tambahan ketrampilan tentang arti pentingnya labeling pada suatu produk, karena salah satu permasalahan pelaku usaha atau UKM adalah produk yang dihasilkan seringkali tidak diberi labeling padahal hal tersebut sangat penting karena fungsi labeling dalam suatu produk adalah mampu memberikan nilai tambah pada produknya agar lebih menarik calon pembeli. Hal ini diungkapkan oleh Drs Alfian , MM Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 12 Februari 2016 berikut ini:

“Kami mempunyai komitmen yang kuat terhadap pengentasan kemiskinan terutama pada industri mikro seperti pelaku usaha khususnya yang membuat mie sagu . Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah produk yang dihasilkan tanpa desain kemasan dan label yang sederhana dikemas dengan plastik dan tanpa label. Hal ini disebabkan pemahaman mengenai fungsi sebuah kemasan atau label belum dipahami sepenuhnya. Padahal kedua medium tersebut mampu memberikan nilai tambah pada produknya agar lebih menarik calon pembeli..”

Hal ini dikuatkan oleh ibu Rahmah salah seorang palaku usaha mie sagu dan beliau juga memiliki warung yang menjual masakan berbahan baku mie sagu diolah menjadi berbagai jenis masakan yang mendapatkan pelatihan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti yang peneliti wawancarai pada tanggal 13 Februari 2016 sebagai berikut:

“ Beliau membenarkan bahwa sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang kemasan dan label yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti . Pelatihan tersebut menurut beliau sangat baik karena dari hasil pelatihan tersebut sudah dibuktikan bahwa produk mie sagu yang saya pasarkan sudah memiliki kemasan dan label walaupun desainnya

masih sederhana. Selanjutnya hasil dari produk yang sudah menggunakan kemasan dan label memberikan dampak yang baik karena produk lebih mudah dikenali oleh konsumen sehingga secara langsung mampu meningkatkan penjualan.

Dengan demikian metode pelatihan yang dilaksanakan bagi pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sehingga mampu untuk membuka dan mengembangkan usaha agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh instansi teknis daerah Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pelaku usaha khususnya penghasil mie sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi melalui kebijakan peningkatan kemampuan masyarakat. hal ini telah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dimana sangat membutuhkan modal , bantuan peralatan produksi dan berbagai macam ketrampilan untuk berusaha dan pengetahuan untuk memperluas usaha.

1. Peran pemerintah melalui Bantuan modal telah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, namun penyalurannya belum merata sesuai dengan kondisi masyarakat. Dimana masih banyak para pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan, dikarenakan proses administrasi yang tidak dipahami oleh pelaku usaha khususnya mie sagu.
2. Bantuan peralatan produksi sangat dibutuhkan para pelaku usaha untuk mempermudah dalam menghasilkan dan meningkatkan kapasitas dari produk yang dihasilkan, namun dalam

pemberian peralatan produksi ini, masih ada pelaku usaha yang tidak mendapatkan bantuan peralatan produksi.

3. Pelatihan kepada para pelaku usaha adalah mengusahakan agar masyarakat pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkannya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan hasil produk dan meningkatkan kualitas produk sekaligus pada akhirnya kondisi ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha dan UKM . Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 orang pelaku usaha salah satu yaitu ibu Rahmah sudah menerapkan ketrampilan yang beliau peroleh dari program pelatihan dari produk yang beliau hasilkan, yang dibuktikan bahwa produk yang dihasilkan teksturnya lebih halus dan rata dan sudah menggunakan kemasan walaupun masih sederhana.

Saran

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh instansi teknis daerah Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti masih memiliki kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam memberikan modal kepada masyarakat pelaku usaha di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi sebaiknya jika melalui lembaga keuangan yang pengelolannya diberikan kepada kelompok masyarakat pelaku usaha sendiri, untuk itu pada tahap awalnya butuh pelatihan dan pendampingan dari pihak pemerintah atau dari pihak swasta yang mengerti tentang pengelolaan keuangan, dengan harapan pelaku usaha dapat mengelola keuangan tersebut.
2. Pemberian peralatan produksi sebaiknya pemerintah harus adil tidak berdasarkan adanya hubungan kekeluargaan artinya pengadaan mesin untuk pelaku usaha supaya pihak pemerintah melakukan survey terlebih dahulu dimana

masyarakat pelaku usaha prioritas yang berhak mendapatkan bantuan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Untuk itu harus dibuat criteria-kriteria tertentu bagi masyarakat yang berhak untuk mendapatkan program pemberdayaan.

3. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah agar berkelanjutan sebaiknya memberikan pengetahuan, ketrampilan, metode-metode yang baru agar senantiasa seiring berjalannya waktu kemampuan dan kompetensinya sebagai pelaku usaha meningkat dan pada akhirnya mampu tumbuh dan berkembang menjadi pelaku usaha yang sukses dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Drucker, Peter, F. 2002. *The Dicipline of Innovation*. Harvard: Harvard Business School Publishing Corporation
- Machfoedz Mas'ud & Machfoedz Mahmud. 2004 *Kewirausahaan Suatu Pendekatan Kontemporer*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YPKP
- Sagir, Soeharsono. 2011. *Ekonomi Berpihak Kepada Rakyat, Pro Poor, Pro Job, Pro Growth*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Chambers, Robert, 1987, *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta.
- Dewanta, Setya Awan, et. all (Eds), 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Friedman, 1992, *Empowerment The Politics of Alternative Development*, Blackwell Offord, USA.
- Miles, Matthew and Huberman, Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mukherjee, Nilanjana, et. all, 2002, *Masyarakat, Kemiskinan dan Mata Pencaharian: Mata Rantai*

- Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia*, Jakarta.
- Pambudi, Himawan S, et all, 2003, *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, LAPPERA PUSTAKA UTAMA, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan sosial*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Sutyastie RS, dan Prijono T, 2002, *kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tan, Jo Hann dan Topatimasang, Roem, 2003, *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*, SEACP, Yogyakarta.
- Dokumentasi :
Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Angka tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti.
Rentra SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2011-2015
Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2014